

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur keuangan daerahnya.

Untuk mendukung otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 1.1 berikut memperlihatkan target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2012:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2007-2012

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi | |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| | | (Rp) | (%) |
| 2007 | 1,157,286,889,000 | 1,281,399,815,356 | 110.72 |
| 2008 | 1,561,962,527,255 | 1,727,432,663,925 | 110.59 |
| 2009 | 1,543,438,605,781 | 2,026,241,165,035 | 131.28 |
| 2010 | 1,849,528,914,910 | 1,920,971,382,917 | 103.86 |
| 2011 | 2,071,161,195,841 | 2,183,958,892,494 | 105.45 |
| 2012 | 2,823,807,882,000 | 2,818,335,413,347 | 99.81 |
| Rata-Rata | 1,834,531,002,465 | 1,993,056,555,512 | 110.29 |

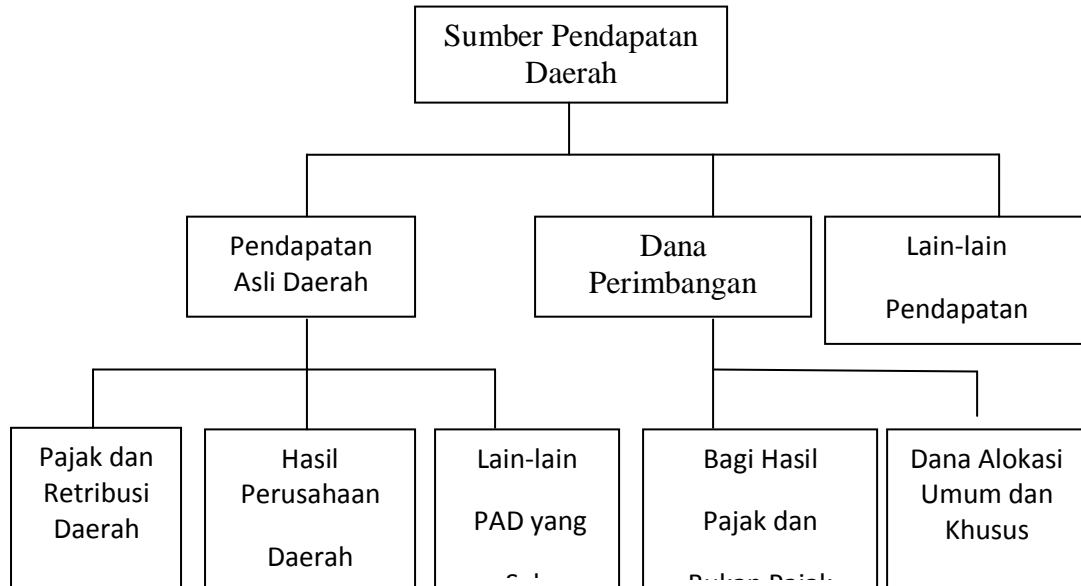
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa selama 5 tahun berturut-turut (2007-2011) realisasi penerimaan pendapatan daerah melebihi target yang sudah ditetapkan. Kecuali pada tahun 2012 realisasi tidak sesuai dengan target yaitu sebesar 99,81%. Bila dihitung rata-rata pendapatan daerah selama 6 tahun terakhir sebesar 110,29%.

Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, adapun upaya dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Gambar 1.1 memperlihatkan skema sumber Pendapatan Daerah:

Gambar 1.1
Skema Sumber Pendapatan Daerah



Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 1.2 berikut memperlihatkan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2012:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2012

| Tahun | Target | Realisasi | |
|-----------|-------------------|----------------------|---------|
| | | (Rp) | (%) |
| 2007 | 491,315,593,000 | 571,607,519,378 | 116.34% |
| 2008 | 636,224,684,255 | 794,300,186,403 | 124.85% |
| 2009 | 737,857,852,781 | 739,454,680,779 | 100.22% |
| 2010 | 946,564,523,820 | 1,006,820,947,269 | 106.37% |
| 2011 | 1,147,303,769,956 | 1,224,414,657,998 | 106.72% |
| 2012 | 1,137,692,342,000 | 1,121,219,295,862.24 | 98.55% |
| Rata-Rata | 849,493,127,635 | 722,766,331,971.17 | 130.61% |

Sumber Data: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui target yang telah ditetapkan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012 sebesar 98,55% dengan rata-rata sebesar 130,61%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat semakin baik yang merupakan hasil usaha pemerintah demi terwujudnya kemandirian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Pajak jika dilihat dari wewenangnya dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan.

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 17 Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) dalam melaporkan hasil pajak provinsinya:

Tabel 1.3
Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Provinsi Sumatera Barat

| No | Lokasi UPTD | No | Lokasi UPTD |
|----|----------------|----|---------------|
| 1 | Padang | 10 | Padangpanjang |
| 2 | Bukittinggi | 11 | Lubuk Basung |
| 3 | Payakumbuh | 12 | Sawahlunto |
| 4 | Batusangkar | 13 | Solok Selatan |
| 5 | Solok | 14 | Dharmasraya |
| 6 | Pariaman | 15 | Pasaman Barat |
| 7 | Sijunjung | 16 | Kab. Solok |
| 8 | Lubuk Sikaping | 17 | Kab. 50 kota |
| 9 | Painan | | |

Sumber data: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Jenis pajak daerah Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
- e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akhir-akhir ini cukup pesat. Peningkatan ini terjadi karena perekonomian masyarakat semakin meningkat. Hal ini juga disebabkan dengan semakin mudahnya persyaratan mendapat kredit pembelian kendaraan bermotor.

Dapat kita lihat sekarang ini banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan menggunakan kendaraan pribadi dari pada angkutan umum dalam menjalankan aktivitas mereka dan pertumbuhan ini juga menyebabkan begitu mudah mendapatkan atau memperoleh kendaraan bermotor yang mereka inginkan yaitu dengan diadakannya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat. Down Payment (DP)/uang muka pembelian kendaraan jalur kredit juga semakin kecil. Dampak dari itu, terkadang satu keluarga mempunyai kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor lebih dari satu unit. Jangankan di kota, di kampung-kampung saja, ada keluarga yang hidup sederhana, tapi sepeda motornya lebih dari satu unit.

Selain itu selera masyarakat yang berubah-ubah dalam memiliki kendaraan bermotor, mengakibatkan memudahkan perpindahan kepemilikan antara satu pihak dengan pihak lain. Jika hal ini terus berlangsung maka akan berdampak pada pengenaan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN, DAN PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007-2012?
2. Seberapa besar Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007-2012?
3. Seberapa besar tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007-2012?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2012.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2012.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ada pun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana serta menambah dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) untuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian adalah untuk menghindari terlalu luas ulasan penelitian. Pembatasan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya membahas kontribusi, Efektivitas Pemungutan, dan tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2007-2012.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data penerimaan pajak daerah dari tahun 2007-2012.
3. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan rincian:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan penjabaran latar belakang yang mendasari munculnya ide penelitian. Dilanjutkan dengan penyusunan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini meninjau teori dan konsep yang relevan terkait dengan masalah penelitian. Selain itu, dikemukakan tinjauan penelitian terdahulu, review penelitian terdahulu, serta kerangka teoritis yang berperan sebagai landasan dalam menganalisis masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian. Dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai objek penelitian, serta analisis dan pembahasan hasil penelitian sehingga dapat menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Beberapa saran, dan keterbatasan penelitian juga dijabarkan pada bab ini.